

## DAFTAR PUSTAKA

- Ervana, O. N. (n.d.). *PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN TARIF PAJAK TERHADAP ETIKA PENGGELAPAN PAJAK (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Klaten)*. <https://doi.org/10.24964/japd.v1i1.802>
- Fransiska Julia. (2021a). SKRIPSI JULIA FRANSISKA. *PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR*.
- Fransiska Julia. (2021b). SKRIPSI JULIA FRANSISKA. *PENGARUH JUMLAH PEMERIKSAAN PAJAK DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN DENGAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK SEBAGAI VARIABEL INTERVENING PADA KPP PRATAMA MEDAN TIMUR*.
- Hakim, Z., Handajani, L., & Inapty, B. A. (2017). *VOLUNTARY TAX COMPLIANCE WAJIB PAJAK PERUSAHAAN PERHOTELAN: DETERMINAN, KEPERCAYAAN DAN KEKUASAAN LEGITIMASI: Vol. XXI (Issue 02)*.
- Imam Gozali. (2021). *APLIKASI ANALISIS MULTIVARIATE Dengan Program IBM SPSS 26 Edisi 10* (Apriya Heri S, Ed.). Badan Penerbit Universitas Diponegoro .
- K Rosalina. (2020). Skripsi. *PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN PAJAK TERHADAP PENINGKATAN KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MAKASSAR UTARA*.
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2022, August 4). *Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak Mencapai 84% Pada Tahun 2021*. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id)
- Kirchler, E., Hoelzl, E., & Wahl, I. (2008). Enforced versus voluntary tax compliance: The “slippery slope” framework. *Journal of Economic Psychology*, 29(2), 210–225. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2007.05.004>
- Kogler, C., Batrancea, L., Nichita, A., Pantya, J., Belianin, A., & Kirchler, E. (2013). Trust and power as determinants of tax compliance: Testing the assumptions of the slippery slope framework in Austria, Hungary, Romania and Russia. *Journal of Economic Psychology*, 34, 169–180. <https://doi.org/10.1016/j.joep.2012.09.010>
- Machmudah, N., & Putra, U. Y. (2020). *Pengaruh TARIF PAJAK, PENGETAHUAN PERPAJAKAN, DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN PEMBAYARAN PAJAK UMKM KULINER*.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi Tahun 2011* (Andi, Ed.; 2016th ed.).
- Muhamad, M. S. , A. M. , & C. P. B. J. (2019). *Kepatuhan . Muhamad, M. S., Asna Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan*

*Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Spt Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada Kpp Pratama Jayapura), (Vol. 14, Issue 1).*

- Nindya Ghea. (2018a). 4798-9333-1-SM. *PENGARUH PENGETAHUAN PAJAK, KEADILAN PAJAK DAN SANKSI PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK (STUDI KASUS WPOP PEKERJA BEBAS DI KPP MALANG SELATAN).*
- Nugrahanto, A., Keuangan Negara STAN Soupani Andri Nasution, P., Jenderal Pajak, D., Keuangan Alamat Korespondensi, K. R., & Pertama, D. (n.d.). *PENGARUH PEMERIKSAAN PAJAK TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK BADAN DI INDONESIA.*
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (n.d.). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan, 4*, 2022. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/fairvalue>
- Putri Riesta. (2017). penelitian terdahulu 5. *PENGARUH KESADARAN WAJIB PAJAK, SANKSI PERPAJAKAN, SISTEM ADMINISTRASI PERPAJAKAN MODERN, PENGETAHUAN KORUPSI, DAN TAX AMNESTY TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI KPP PRATAMA SEMARANG CANDISARI.*
- Ratmono Dwi. (2018). 75713-ID-model-kepatuhan-perpajakan-sukarela-pera. *MODEL KEPATUHAN PERPAJAKAN SUKARELA: PERAN DENDA, KEADILAN PROSEDURAL, DAN KEPERCAYAAN TERHADAP OTORITAS PAJAK.*
- Resmi Siti. (2019). *PERPAJAKAN Teori dan Kasus* (11th ed.). Salemba Empat.
- Sugiono. (2013). *Metodologi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Alfabeta.
- Wahl, I., Kastlunger, B., & Kirchler, E. (2010). Trust in authorities and power to enforce tax compliance: An empirical analysis of the “slippery slope framework.” *Law and Policy, 32*(4), 383–406. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9930.2010.00327.x>
- Waluyo Trihadi. (2020). 576-Article Text-4778-1-10-20210614. *PEMERIKSAAN TERHADAP WAJIB PAJAK YANG TIDAK MENYAMPAIKAN SPT, KETENTUAN DAN PEMILIHANNYA SESUAI SE-15/PJ/2018.*